



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAUHARI
2. Jabatan : KEPALA KPPN BANDAR LAMPUNG
3. NHK : 468352

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.420.645.000**

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 815.000.000
5. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.020.000
7. Tanah Seluas 977 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 126.075.000
8. Tanah Seluas 754 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 121.550.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **83.400.000**



1. MOBIL, Rush Mini Bus Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, Revo Bebek Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000
3. MOTOR, Jupiter Bebek Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 525.179.085

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.037.224.085

III. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.637.224.085

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.